

INTISARI

MASPEKEH, H., 2018, EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGADAAN KEBUTUHAN OBAT PUBLIK SERTA KETERSEDIAAN OBAT DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2016, TESIS, FAKULTAS FARMASI, UNIVERSITAS SETIA BUDI SURAKARTA.

Ketidakmampuan merencanakan kebutuhan obat dengan baik di tingkat Puskesmas, akan berpengaruh pada persediaan obat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian perencanaan, pengadaan kebutuhan obat publik dan tingkat ketersediaan obat dengan indikator efisiensi dan efektifitas pengelolaan obat serta permasalahan yang terjadi dalam perencanaan dan pengadaan kebutuhan obat publik di wilayah kerja dinas kesehatan daerah kota tomohon tahun 2016.

Rancangan penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui pengamatan dokumen obat tahun 2016, obat Indikator sebanyak 144 item obat, serta wawancara dengan pengelola obat, Kepala Puskesmas, Kepala Instalasi Farmasi Kota Tomohon dan Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon. Data yang diperoleh dianalisis dengan indikator efisiensi dan efektifitas pengelolaan obat menggunakan indikator Depkes dan dibandingkan dengan standar atau hasil penelitian lain.

Hasil yang tidak sesuai standar yaitu rata-rata perencanaan obat yang tepat di puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon adalah sebesar 33,35%, kurang tepat sebesar 48,03% dan berlebih sebesar 18,62%. Persentase alokasi dana pengadaan obat di IFK sebesar 3,91%. Rata-rata persentase kesesuaian antara pengadaan dengan kenyataan pakai obat 94,98%. Frekuensi pengadaan IFK 1 kali setahun. Hasil yang sesuai standar yaitu rata-rata persentase kesesuaian item obat yang tersedia sebesar 94,33%. Rata-rata persentase penyimpangan perencanaan 5,66%. Persentase ketersediaan dana pengadaan obat di IFK tahun 2016 sebesar 100%. Tidak pernah terjadi kesalahan faktur. Rata-rata lama waktu pembayaran dari dinas kesehatan kepada distributor adalah 50 hari dengan rata-rata lama waktu pembayaran yang disepakati yaitu 60 hari. Rata-rata tingkat ketersediaan obat kategori kurang sebesar 5,97%, aman sebesar 76,88%, dan berlebih sebesar 17,15%. Prioritas penanganan masalah sebagai berikut: 1). Menyusun Standar Operasional Prosedur pengelolaan obat. 2). Membentuk Tim Perencanaan Obat Terpadu Kabupaten/Kota. 3). Menyelenggarakan pelatihan tentang pengelolaan obat. 4). Menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pengelolaan obat.

Kata kunci : perencanaan, pengadaan, ketersediaan obat, indikator efisiensi

ABSTRACT

MASPEKEH, H., 2018, EVALUATION PLANNING AND PROCUREMENT OF NEEDS OF PUBLIC DRUG AND MEDICAL AVAILABILITY IN REGIONAL HEALTH WORK AREA OF TOMOHON CITY IN 2016, THESIS, FACULTY OF PHARMACY, SETIA BUDI UNIVERSITY. SURAKARTA.

An inability to properly plan needs at the health centers level will have an effect on drug preparation. The purpose of this research is to know the suitability of planning, procurement of medicines society and level of drugs with indicator of efficiency and effectivity of drugs and problems that occur in the planning and procurement of medicines in Regional Health Work Area of Tomohon City of 2016.

Descriptive research design. Data obtained through observation of drug documents in 2016, drug indicator as many as 144 items of drugs, as well as interviews with drug managers, Head of health centers, Head of Pharmacy Installation and Secretary of Regional Health Work Area of Tomohon City. The data obtained were analyzed with efficiency and effectiveness indicators of drug management using Health Department indicator and compared with standard or other research result

Results that are not in accordance with the standard that the average of the appropriate drug planning is 33.35%, less precise by 48.03% and excess of 18.62%. The percentage of allocation of drug procurement funds in Pharmacy Installation was 3.91%. The average percentage of conformity between the procurement and the fact of drug use was 94.98%. Frequency of Pharmacy Installation procurement 1 times a year. The standard result is the average percentage of suitability of available drugs item of 94.33%. Mean planning deviation percentage is 5.66%. The percentage of availability of drug procurement funds in Pharmacy Installation by 2016 is 100%. Never an invoice error occurred. The average duration of payment from the health service to the distributor is 50 days with the average length of the agreed payment time of 60 days. The average level of drug availability category less by 5.97%, safe by 76.88%, and excess of 17,15%. Priority of problem handling as follows: 1). Establish Standard Operational Procedures of drug management. 2). Establish District / City Integrated Drug Planning Team. 3). Conducting training on drug management. 4). Implementing Management Information System (MIS) of drug management

Keywords: planning, procurement, availability of drugs, efficiency indicators